

Dilema Etis Keterlibatan Hamba Tuhan dalam Politik Praktis di Indonesia: Suatu Analisis Etika Kristen

¹Welikinsi, ²Senan Beriangan

^{1,2}Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Sintang Kal-bar
welikinsi@gmail.com

Abstract: *Politics is a calling for the church to be involved in it. It is normal for the church to support its members to enter politics, but it is somewhat ambiguous if a pastor or servant of God enters practical politics. It is therefore difficult to see the limits of who can be involved in practical politics in the church. The purpose of writing this article is to answer the main problem in this article, namely to what extent can servants of God be involved in practical politics? What is the analysis from the perspective of Christian ethics regarding the involvement of God's servants and practical politics? The method used in this article is a descriptive qualitative method, where in the process the researcher uses a library approach, namely by examining several reference sources including books, journals and other relevant sources. The result of this research is that the church is called to be the salt and light of the world, one of which is to enter the world of politics. The church is called to be involved in welfare and upholding justice in society. Servants of God who want to get involved in practical politics must be very careful because of the various challenges that await them in the arena of political battle. The urgency of the ministry of God's servants is more inclined to serve the congregation. By serving the congregation, God's servants are expected to be able to guide and provide correct direction regarding practical politics, how the congregation should be involved in it. This is in accordance with the vocation of God's servants in general who are called to serve the congregation.*

Keywords: *Christian ethics; servants of God; practical politics.*

Abstrak: Dalam konteks demokrasi Indonesia yang dinamis, keterlibatan umat Kristen, khususnya hamba Tuhan, dalam politik praktis menjadi isu etis dan teologis yang penting untuk dikaji. Masih kuatnya anggapan bahwa politik adalah wilayah "kotor" membuat banyak gereja bersikap pasif terhadap politik, padahal iman Kristen memanggil gereja untuk menjadi garam dan terang dunia. Artikel ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: pertama, sejauh mana hamba Tuhan dapat dan seharusnya terlibat dalam politik praktis di Indonesia; kedua, bagaimana telaah etika Kristen terhadap keterlibatan tersebut serta respon gereja dan masyarakat terhadapnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan, menelaah sumber-sumber teologis dan empiris dari buku, jurnal, dan laporan penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan, klasifikasi, analisis tematik, dan sintesis etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan hamba Tuhan dalam politik dapat dibenarkan sejauh berlandaskan panggilan pelayanan dan orientasi pada keadilan sosial, bukan ambisi kekuasaan. Namun, tanpa pendidikan politik yang etis dan akuntabilitas gerejawi, keterlibatan tersebut berisiko mencemari kesaksian iman dan menimbulkan konflik loyalitas. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembekalan politik yang

berakar pada nilai-nilai kristiani serta mekanisme akuntabilitas etis bagi pelayan gereja. Dengan demikian, politik dipahami bukan sebagai lawan iman, tetapi sebagai medan pelayanan publik yang merealisasikan nilai Kerajaan Allah dalam masyarakat demokratis.

Kata kunci: Etika Kristen; hamba Tuhan; politik praktis.

I. PENDAHULUAN

Dalam konteks demokrasi Indonesia yang semakin dinamis menjelang pemilihan umum nasional, partisipasi politik umat Kristen menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Umat Kristen di Indonesia tidak hanya berhadapan dengan tantangan sebagai minoritas, tetapi juga dengan pertanyaan mendasar: bagaimana iman Kristen dan panggilan pelayanan gereja berhubungan dengan ranah politik? Masih lazim ditemukan pandangan bahwa “politik itu kotor”, sehingga banyak gereja dan jemaat memilih jalan menjauh dari keterlibatan politik atau hanya menjadi pengamat pasif. Pandangan ini memiliki akar historis, seperti pengaruh gerakan pietisme yang memisahkan urusan “rohani” dan “duniawi”. Namun dalam realitas sosial-politik Indonesia kontemporer, pendekatan demikian terbukti kurang memadai.

Penelitian oleh Lumoindong menunjukkan bahwa gereja di Indonesia sering menghadapi kekurangan dalam pendidikan politik untuk jemaatnya, yang kemudian berdampak pada rendahnya partisipasi umat Kristen dalam arena politik. “*Lack of political education within the church*” menjadi salah satu penyebab utama.¹ Hal ini menunjukkan bahwa selain soal niat dan panggilan, ada masalah struktural edukasi yang membatasi keterlibatan umat Kristen secara bermakna. Lebih jauh, penelitian Pangkey menyoroti adanya dualisme konseptual di kalangan umat Kristen antara spiritualitas Kristen dan tanggung jawab kewargaan. Studi yang melibatkan 518 responden dari gereja-denominasi injili ini menunjukkan bahwa meskipun banyak jemaat percaya pentingnya keterlibatan sosial, mereka tetap ragu untuk aktif dalam ranah politik praktis karena khawatir “tercemar” oleh logika kekuasaan duniawi.² Dengan kata lain, konflik internal antara panggilan pelayanan dan kewargaan penuh dalam politik menjadi pemicu sikap apatis atau berhitung hati-hati di ranah publik.

Sementara itu, dalam studi lapangan tentang “Peran Politis Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) pada Pemilu 2024”, ditemukan bahwa sebuah gereja di Halmahera secara aktif memobilisasi anggota jemaatnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024, dan

¹ Gilbert Lumoindong and Greivance Lumoindong, “Church Participation in Building Political Civilization in Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5, no. 11 (2024): 2911–17, <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i11.1499>.

² Agustina Sjelfrita Pangkey, “Pemahaman Dualisme Dan Perspektif Tentang Kekuasaan: Terhadap Sikap Sosial Politik Orang Kristen,” *TRANSFORMATIO: Jurnal Teologi, Pendidikan, dan Misi Integral* 2, no. 2 (2025): 133–48.

pemimpin gereja memiliki “*symbolic ties with certain candidates*”.³ Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan gereja secara institusional dalam politik bukan hanya teori, tetapi nyata. Namun studi tersebut juga mengingatkan bahwa kalau netralitas tidak dijaga, risiko polarisasi dalam jemaat muncul. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana gereja dan hamba Tuhan mengelola keterlibatan politik praktis agar tidak merusak kesaksian rohani dan kerukunan internal.

Dalam kerangka ini, isu khusus yang masih kurang terjelajahi adalah keterlibatan hamba Tuhan (misalnya pendeta/pelayan penuh waktu) dalam politik praktis secara pribadi atau sebagai calon legislatif/eksekutif. Meski banyak tulisan normatif dan teologis yang mendorong bahwa politik merupakan bagian dari panggilan umat Kristen sebagai “garam dan terang dunia”, namun literatur empiris yang menggambarkan bagaimana hamba Tuhan secara individual menanggapi panggilan tersebut, bagaimana gereja meresponnya, dan apa implikasi sosial-politiknya, masih terbatas. Misalnya dalam artikel oleh Putra et al., dicatat bahwa banyak anggota jemaat menolak politik praktis karena menganggapnya kotor dan bertentangan dengan kebenaran Alkitab.⁴ Namun penelitian tersebut berhenti pada ranah teologi dan persepsi umum jemaat, belum memasuki ranah empiris yang menelusuri keputusan praktis hamba Tuhan untuk masuk politik dan dinamika yang timbul sesudahnya.

Dengan demikian, gap penelitian yang muncul dari paparan di atas dapat diidentifikasi yaitu: Pertama, belum banyak studi empiris yang secara spesifik memetakan dan menganalisis hamba Tuhan yang terlibat dalam politik praktis di Indonesia seperti berapa banyak, bagaimana motivasi dan prosesnya, bagaimana respon gereja institusional, dan bagaimana dampaknya bagi jemaat dan masyarakat. Kedua, walaupun banyak kajian etis-teologis yang menegaskan bahwa politik adalah bagian dari panggilan Kristen, kerangka etis-praktis yang menghubungkan pelayanan hamba Tuhan, praktik politik, dan konteks demokrasi Indonesia masih kurang. Ketiga, dinamika persepsi publik terhadap pemuka gereja yang masuk politik dan bagaimana hal itu mempengaruhi kredibilitas pelayanan gereja juga masih jarang dikaji secara sistematis.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan sentral yakni: Pertama, sejauh mana hamba Tuhan dapat dan seharusnya terlibat dalam politik praktis di Indonesia? Kedua, bagaimana telaah etika Kristen terhadap keterlibatan tersebut, serta bagaimana respon gereja dan masyarakat terhadapnya? Dengan menempatkan analisis pada konteks demokrasi kontemporer, pelayanan gereja, dan praktik politik, diharapkan penelitian ini dapat mengisi kekosongan empiris dan konseptual yang selama ini ada.

³ Anselmus Puasa et al., “Peran Politis Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH) Pada Pemilu 2024,” *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 7, no. 1 (2025): 361–69, <https://doi.org/10.37364/jireh.v7i1.439>.

⁴ Puasa et al., “Peran Politis Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH) Pada Pemilu 2024,” 78.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penalaran induktif, di mana pemahaman umum dibangun dari pengamatan dan penelaahan terhadap berbagai sumber literatur yang spesifik dan relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena teologis dan etis secara mendalam, bukan untuk menguji teori atau menghasilkan generalisasi empiris. Pendekatan kualitatif deskriptif sesuai dengan studi teologi yang menafsirkan makna etis dan spiritual suatu fenomena. Karena fokus penelitian adalah pemaknaan dan refleksi etis atas peran hamba Tuhan dalam politik.⁵

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan dengan empat langkah utama, yaitu: Pertama, mengumpulkan literatur berupa buku dan artikel jurnal. Kedua, mengklasifikasi literatur yang kemudian akan menjadi rujukan dalam membangun argument dalam hasil pembahasan. Pengelompokan sumber berdasarkan tema seperti etika Kristen dan politik, dasar Alkitab untuk politik praktis dan keterlibatan gereja atau hamba Tuhan dalam ranah politik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Hakikat Politik Praktis

Kata “politik” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* dan *politeia*. *Polis* berarti benteng, kota, negara, dan kemudian menjadi bentuk negara demokratis, sementara *politeia* mendeskripsikan prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau bentuk negara atau tindakan-tindakan kenegaraan.⁶ *Polis* merujuk kepada tempat dan suasana dimana kehidupan bermasyarakat diajar dan dibangun, dan politik merupakan usaha bersama dalam membangun dan menjaga *polis*.⁷ Defenisi ini menuntun kepada pengertian bahwa politik merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu negara, berupa prinsip-prinsip maupun tindakan-tindakan yang dilakukan di dalamnya. Aristoteles mengemukakan bahwa “manusia adalah binatang politik,” ia menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik, interaksi di antara manusia (dua atau lebih) tidak dapat terlepas dari hubungan politik.⁸ Defenisi ini membawa kepada pengertian yang luas oleh filsafat Yunani kuno mengenai politik yang menyangkut negara dan segala bentuk tindakan dan orang di dalamnya.

Setidaknya dari abad ke-5 hingga abad ke-19 politik dipengaruhi oleh paham para filsuf Yunani kuno seperti Plato dan juga Aristoteles. Mereka mendefinisikan politik sebagai suatu bentuk usaha untuk mencapai masyarakat politik yang ideal, di mana manusia

⁵ Brylialfi Wahyu Furidha, “Comprehension of The Descriptive Qualitative Research Method: A Critical Assessment of The Literature,” *Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 4 (2023): 3, <https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443>.

⁶ Robert P. Borrong, *Etika Politik Kristen: Serba-Serbi Politik Praktis* (Unit Publikasi dan Informasi & Pusat Studi Etika Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, 2006), 2–3.

⁷ Andreas Yewangoe, *Agama Dan Kerukunan* (BPK Gunung Mulia, 2001), 162.

⁸ Clymer Carlton Rodee, *Pengantar Ilmu Politik* (PT Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

diharapkan memperoleh hidup yang bahagia sebagai hasil dari memperoleh peluang dalam meningkatkan bakat, bersosialisasi dengan rukun dan hidup dalam moralitas yang tinggi.⁹ Kebahagiaan merupakan tujuan akhir dari politik, dan untuk memperolehnya tindakan-tindakan politik diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat yang dikelolanya untuk memperoleh kebahagiaan.

Rumusan lainnya disampaikan oleh Zakaria Ngelow. Ia mendefinisikan politik sebagai proses perundingan rakyat tentang bagaimana mereka hidup satu dengan yang lainnya di dalam suatu kumpulan yang diatur oleh sistem bernegara.¹⁰ Ini menjelaskan bahwa politik merupakan unsur dari manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial saling bergantung satu dengan yang lainnya. Ketergantungan dengan manusia lain inilah yang menimbulkan interaksi di antara individu maupun kelompok yang kemudian menuntun kepada perundingan tentang bagaimana mereka hidup dalam sistem yang ditetapkan bersama. Bagaimana rakyat diatur untuk hidup oleh pemerintah itulah yang dinamakan politik.

Saut Sirait merumuskan pengertian politik sebagai tindakan yang bermacam jenis dalam suatu entitas dan sistem politik negara yang mencakup proses penentuan tujuan, pelaksanaan tujuan dengan segala kebijakan-kebijakan umum dan pengaturannya.¹¹ Sirait memperlihatkan betapa luasnya pengertian politik. Ia menunjukkan bahwa segala tindakan dan kebijakan, pengaturan serta tujuan di dalam suatu negara merupakan bagian dari politik. Susanta mengemukakan bahwa politik juga dapat dipahami sebagai usaha-usaha dalam mendapatkan kekuasaan,¹² dimana ada upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka yang terlibat di dalamnya untuk memperoleh kekuasaan. Dari definisi-definisi yang telah dijabarkan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan umum mengenai arti dari politik, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di dalam suatu negara yang diatur oleh sistem pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Beranjak dari definisi politisi secara umum, politik praktis dapat diartikan sebagai suatu keadaan saat semua itikad, motif, kepentingan, dan ambisi hadir bersama dengan tujuan memperebutkan kekuasaan berupa jabatan, posisi, atau kedudukan yang berfungsi sebagai sarana memperoleh kekuatan dalam memberi keputusan-keputusan publik.¹³ Artinya politik praktis merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan secara langsung

⁹ Miriam Budiardjo, *Demokrasi Di Indonesia: Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila* (Gramedia Pustaka Utama, 1994), 55.

¹⁰ Zakaria J. Ngelow et al., *Teologi Politik: Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pascaorde Baru* (Yayasan OASE INTIM, 2013), 292.

¹¹ Saut Sirait, *Politik Kristen Di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis* (BPK Gunung Mulia, 2006), 24.

¹² Yohanes Krismantyo Susanta, "Orang Kristen Dan Politik: Belajar Dari Kasus Salomo Dan Adonia Dalam Persaingan Menuju Tahta," *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2019): 26.

¹³ Alfons Renaldo Tampenawas, "Pandangan Eklesiologi Calvin Mengenai Politik Praktis Dalam Pelayanan Gereja," *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 117, 2, <https://doi.org/10.55884/thron.v1i2.7>.

dalam upaya memperoleh kekuasaan berupa jabatan politik di dalam suatu negara. Segala usaha yang dilakukan untuk memperoleh kekuasaan politik merupakan bagian dari politik praktis itu sendiri. Ngelow mensederhanakan pengertian politik praktis sebagai keikutsertaan para hamba Tuhan dalam pertarungan kekuasaan untuk memperoleh jabatan di dalam pemerintahan.¹⁴

Konsep dan Landasan Etika Politik Kristen

Istilah “etika” secara etimologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan, adat, atau kelakuan.¹⁵ Etika juga diambil dari bahasa Latin, yaitu *ethikus* yang berarti penilaian secara normative.¹⁶ J. A. B. Jongeneel mengemukakan bahwa etika merupakan “ajaran tentang yang baik dan yang buruk di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia dan masyarakat.”¹⁷ Malcolm Brownlee mengutarakan bahwa etika merupakan pemikiran yang sistematis tentang kelakuan, motivasi, dan keadaan batin yang mendasarinya.¹⁸

Beragam pendapat dan defenisi mengenai etika dikemukakan oleh berbagai pihak, pendapat Eka Darmaputera dapat menjadi acuan untuk memami pengertian etika itu sendiri. Ia mendefinisikan bahwa etika adalah ilmu yang membahas mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di dalam situasi tertentu.¹⁹ Cukup dekat dengan defenisi sederhana yang diutarakan oleh Lolita Rerihana, etika merupakan nilai-nilai atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia.²⁰

Etika sangatlah luas karenanya ragam cabang etika dikemukakan, dan salah satunya adalah etika Kristen. Defenisi yang diberikan oleh Sosipater berikut dapat menjadi acuan untuk mengerti apa itu etika Kristen. Sosipater mendefinisikan etika Kristen sebagai etika yang berorientasi kepada Alkitab sebagai Firman Allah dan menjadikan Karya Yesus Kristus di dunia sebagai landasan berpijaknya.²¹ Etika Kristen adalah tidak bisa lepas dari Alkitab sebagai acuan utama dan tolak ukur untuk berjalan. Fokusnya adalah kepada karya Yesus Kristus yang menjadi pusat dari Alkitab itu sendiri. Etika Kristen merupakan etika gereja yang berdasarkan Alkitab sebagai Firman Allah.

Etika Kristen itu sendiri dapat dibagi ke dalam berbagai ranah, dan salah satunya adalah etika politik Kristen. Brotosudarmo mengemukakan bahwa etika politik kristiani merupakan tindakan yang berlandaskan pada analisa pikiran dan keputusan batin mengenai hal yang dianggap baik dalam bidang politik supaya sejalan dengan Firman Tuhan. Ia menegaskan bahwa etika Kristen dalam politik tidak bertanggungjawab untuk

¹⁴ Ngelow et al., *Teologi Politik: Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pascaorde Baru*, 25.

¹⁵ Karel Sosipater, *Etika Pelayanan* (Suara, 2010), 1.

¹⁶ Verne H. Fletcher, *Lihatlah Sang Manusia: Suatu Pendekatan Pada Etika Kristen Dasar* (BPK Gunung Mulia, 2007), 27.

¹⁷ Sosipater, *Etika Pelayanan*, 1.

¹⁸ Sosipater, *Etika Pelayanan*, 1.

¹⁹ Eka Darmaputera, *Etika Sederhana Untuk Semua* (BPK Gunung Mulia, 2004), 97.

²⁰ Lolita Luciana Ririhena, *Buku Ajar Etika Kristen* (Penerbit Adab, 2022), 16.

²¹ Sosipater, *Etika Pelayanan*, 2.

mengucapkan Firman Tuhan, namun menjadi petunjuk sederhana untuk mengarahkan dengan tujuan tunduknya semua bangsa dan negara terhadap Tuhan dan Firman-Nya.²² Sederhananya etika Kristen dalam politik dapat dipahami sebagaimana pengertian yang disampaikan oleh Robert Borrong, yaitu nilai-nilai etika dan panduan moral yang bersangkutan dengan perilaku politik yang diwujudkan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan negara.²³

Hubungan Gereja dan Politik

Gereja sebagai Garam dan Terang (Matius 5:13-16)

Matius 5:13-16 merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Pada bagian ini Yesus menyampaikan kepada murid-murid-Nya bahwa identitas mereka adalah garam dunia dan terang dunia. Tidak hanya bagi murid-murid Yesus saja, identitas yang sama juga merupakan bagian dari orang percaya dalam segala zaman, dan gereja khususnya. Gereja dipanggil ke dunia sebagai garam dunia dan terang dunia, berperan menjadi garam yang mencegah kebusukan dunia dan membawa terang Kristus ke dalam dunia yang gelap oleh sebab dosa.

Parel dan Maidiantius menanggapi identitas gereja sebagai garam dan terang sebagai suatu perintah dari pada Allah untuk menggarami dan menerangi dunia, hal tersebut mengajak gereja untuk melihat bahwa dalam semua tempat ada kesempatan untuk melayani, gereja harus menjadi saksi di manapun, ini berarti gereja juga harus menghidupi identitasnya sebagai garam dunia dan terang dunia dengan terlibat juga dalam dunia politik.²⁴ Ranah menghidupi kehidupan sebagai garam dan terang dunia sangat luas dan harus masuk ke dalam setiap bidang kehidupan manusia, termasuk politik.

Pemahaman serupa terhadap ayat ini juga dikemukakan oleh Robert Borrong. Ia melihat bahwa "gereja merupakan warga kerajaan sorga yang ada dan hadir di dunia untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah."²⁵ Oleh sebab itu, gereja tidak bisa terus berlari menjauhi politik, bersikap apatis dan menganggap politik sebagai suatu hal yang tabu yang harus disingkirkan. Gereja haruslah membuang stigma negatif terhadap politik, anggapan bahwa politik itu kotor harus dibuang dari gereja. Gereja harus memahami bahwa politik hanyalah alat, jadi politik itu pada dasarnya bersifat netral, yang tidak netral dan menjadikan politik sebagai sesuatu yang kotor adalah tindakan manusia di dalamnya. Dengan memahami politik dengan benar diharapkan gereja dapat terlibat aktif di dalamnya.

Untuk dapat menggarami dan menerangi dunia gereja harus berani untuk terjun ke dalam dunia politik. Hal ini dimulai dengan memahami politik dengan benar, dilanjutkan

²² R. M. Drie S. Brotosudarmo, *Etika Kristen Untuk Perguruan Tinggi: Etika Dasar Dan Penerapannya Dalam Hidup Praktis Manusia* (ANDI, 2007), 125.

²³ Borrong, *Etika Politik Kristen: Serba-Serbi Politik Praktis*, 7.

²⁴ T. J. Parel and T. J. Maidiantius, *Politik Yesus Bagi Indonesia* (PT. Manata Bina Utama, 2014), 2.

²⁵ Borrong, *Etika Politik Kristen: Serba-Serbi Politik Praktis*, 7.

dengan ikut berperan aktif di dalamnya. Keterlibatan gereja di dalam politik sebagai garam dunia berfungsi untuk mencegah kebusukan, memberi rasa, dan obat sebagaimana fungsi garam pada dasarnya. Fungsi utama garam adalah sebagai pengawet, di mana gereja dapat mencegah kebusukan pada makanan. Gereja sebagai “pengawet” mencegah kebobrokan di dalam dunia perpolitikan dengan mencegah politik yang bersifat merusak dengan memberi contoh bagaimana politik yang benar tanpa harus saling menyingkirkan dan menghalalkan berbagai macam cara untuk memperoleh kepentingan sepihak.

Garam juga berfungsi memberi rasa pada makanan, menjadikannya nikmat untuk disantap dan tidak hambar. Keterlibatan gereja di dalam politik diharapkan memberi dampak yang positif dengan memberi rasa, yaitu hal-hal yang baik dalam perpolitikan sehingga dampak dari politik menjadi sedap dirasakan oleh masyarakat. Fungsi garam sebagai obat, pada dasarnya garam bersifat menyembuhkan. Oleh karena itu, gereja sebagai garam haruslah menjadi sarana kesembuhan bagi mereka yang telah menjadi korban politik. Gereja terjun dengan terlibat aktif di dalam politik untuk melayani orang-orang yang menjadi korban dari mereka yang tidak bertanggungjawab dalam perpolitikan.

Begitu juga sebagai terang dunia, gereja dipanggil untuk membawa terang Kristus di tengah dunia. Terang atau cahaya memberikan penerangan untuk dapat menemukan kebenaran serta mengungkapkan kesalahan di tengah kegelapan. Sebagai terang dunia, gereja semestinya menunjukkan tindakan-tindakan kebenaran dan melalui kebenaran itu secara tidak langsung mengungkapkan apa yang tidak benar di dalam masyarakat. Hal tersebut dapat terwujud jika gereja sebagai terang menjadikan ajaran dan karya Kristus sebagai pedoman bagi gereja dalam keterlibatannya di dalam berpolitik. Ketika gereja dapat menjadi berkat melalui politik sebagai garam dan terang nama Tuhan dipermuliakan (Matius 5:16).²⁶

Gereja sebagai Pembawa Kesejahteraan dan Keadilan (Yeremia 29:1-7; Matius 7:12)

Allah berfirman kepada bangsa Israel untuk mengusahakan kesejahteraan kota di manapun mereka berada. Bangsa Israel tidak boleh acuh dan abai terhadap situasi kota di mana mereka berada, mereka harus terlibat aktif di dalam membangun kota di mana Tuhan menempatkan mereka. Hal ini juga tanggung jawab bagi gereja di masa kini, gereja harus terlibat dalam mensejahterakan wilayah di mana mereka tinggal dan salah satu caranya adalah melalui terlibat di dalam politik. Ini menunjukkan bahwa politik yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat merupakan wujud dari perintah Tuhan.²⁷

Menyikapi hal di atas, umat Kristen sebagai anggota gereja harus terlibat aktif di dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat di mana mereka tinggal dan hal itu dapat

²⁶ Yonatan Alex Arifianto and Aji Suseno, “Filsafat Politik Dan Praktisnya Dalam Perspektif Iman Kristen,” *Antusias: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 6, no. 2 (2020): 89.

²⁷ Djoys Anake Rantung, “Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia,” *Jurnal Shanan* 1, no. 2 (2017): 72, 2, <https://doi.org/10.33541/shanan.v1i2.1492>.

dicapai melalui politik. Anggota gereja harus berani untuk unjuk gigi memperjuangkan kesejahteraan rakyat bersama dengan membawa *shalom* Allah ke tengah dunia melalui politik. Menurut Glen Stassen dan David Gushee, pemahaman yang mereka dapatkan dari khotbah Yesus di bukit membenarkan keterlibatan gereja dalam politik dengan menyoroti khusus Matius 7:12 sebagai patokan di dalam mengukur suatu keputusan mengenai keadilan, yaitu melakukan kepada orang lain apa yang kita kehendaki agar orang lain perbuat juga bagi kita.²⁸

Walaupun aktivitas politik dianggap baik dan menawarkan peluang bagi gereja untuk mendatangkan kesejahteraan dan menjadi sarana menghadirkan Kerajaan Allah di tengah dunia, Stassen dan Gushee menyoroti bahwa aktivitas politik juga mengandung bahaya yang mestinya diwaspadai oleh gereja. Bahaya tersebut adalah menjadi terpengaruh oleh ideologi politik tertentu sehingga panggilan pemuridan Yesus dipengaruhi oleh kekuasaan dan ideologi duniawi yang bersifat merusak.²⁹ Gereja haruslah mendasarkan pemahaman politik dalam sudut pandang yang sehat tentang gereja, negara masyarakat, dan pemerintahan Allah. Ketika gereja (anggota gereja) terlibat dalam politik maka haruslah memikirkan hal praktis yang dapat mentransformasi kehidupan rakyat miskin.

Adanya kesusahan, kebutuhan, dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat juga seharusnya menjadi pendorong bagi umat untuk juga mau terlibat di dalam pelayanan dalam bidang politik. Gereja didorong untuk masuk ke dalam politik melalui pelayanan yang holistik dan ditarik ke dalam politik oleh karena kerinduan pada visi alkitabiah tentang Kerajaan atau pemerintahan Allah.³⁰

Umat Allah yang dipanggil untuk berpolitik berarti memperjuangkan kepentingan seluruh elemen masyarakat, tidak terbatas pada hanya kalangan Kristen saja. Jika ada yang dimaksud dengan kepentingan Kristen maka itu ialah keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.³¹ Ngelow menegaskan bahwa di dalam konteks minoritas di Indonesia tidak tepat jika gereja sebagai minoritas hanya mengusahakan kepentingan minoritas, tetapi harus mengusahakan kepentingan bersama seluruh rakyat.³² Gereja dipanggil untuk terlibat di dalam mensejahterakan dan menegakkan keadilan di tempat di mana gereja berada, yang berarti kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya orang Kristen saja. Kesejahteraan seluruh kota adalah kesejahteraan gereja.

Hamba Tuhan dan Politik Praktis

Telah dijabarkan dengan jelas bahwa gereja dan anggotanya dipanggil untuk turut terlibat aktif di dalam politik sebagai garam dan terang dunia untuk terlibat dalam tujuan

²⁸ Glen H. Stassen and David P. Gushee, *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus Dalam Konteks Masa Kini* (Momentum, 2008), 630–31.

²⁹ Stassen and Gushee, *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus Dalam Konteks Masa Kini*, 631.

³⁰ Ibid.

³¹ Ngelow et al., *Teologi Politik: Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pascaorde Baru*, 27.

³² Ngelow et al., *Teologi Politik: Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pascaorde Baru*, 27.

penyejahteraan dan penegakan keadilan bagi suatu masyarakat di suatu wilayah tertentu. Menyikapi hal ini dapat dilihat bahwa anggota-anggota gereja yang mulai untuk terlibat di dalam politik praktis. Tetapi pada masa kini tidak hanya anggota (jemaat) gereja saja yang terlibat untuk berpartisipasi di dalam politik praktis, tak ketinggalan pula hamba-hamba Tuhan (gembala/pendeta) yang juga turut meramaikan. Pantas dan benar jika gereja melalui anggota-anggotanya terlibat di dalam politik praktis, tetapi menimbulkan kerancuan jika seorang hamba Tuhan meninggalkan pelayanannya karena kemauan untuk terjun ke dalam politik.

Politik praktis adalah keterlibatan seseorang hamba Tuhan ke dalam percaturan politik. Hal ini ditanggapi berbeda oleh masing-masing gereja. Sidang MPL-PGI pada tahun 1992 di Tentena menyatakan bahwa apabila terdapat rohaniawan atau pendeta yang suka melayani dalam bidang politik atau menjadi pegawai negeri, sebaiknya ia tidak duduk di jabatan struktural gereja.³³ Keputusan ini bertujuan untuk mencegah hamba-hamba Tuhan untuk terjun ke dalam politik praktis, namun tidak berhasil membendung kemauan banyak pendeta untuk terjun ke dalam politik praktis. Memang hal tersebut terjadi dengan berbagai alasan, ada yang tidak puas dengan pelayanan hanya dengan berkhotbah saja, ada juga yang meraskan itu sebagai panggilan.

Menanggapi isu politik praktis yang dilakukan oleh hamba-gamba Tuhan, gereja-gereja berbeda-beda tanggapannya. Terdapat gereja-gereja yang bersikap tegas dengan menutup pintu, sehingga bagi mereka yang ingin terjun ke dalam politik mereka harus berhenti menjadi pendeta. Namun ada juga gereja-gereja yang bersikap lebih lunak dengan memberi kesempatan kepada hamba Tuhan yang ingin terjun ke dalam politik praktis dengan memberhentikan jabatan ketika mereka berhasil dan memberi kesempatan kepada mereka untuk kembali melayani ketika semisalnya gagal.

Borrong melihat isu ini dengan perspektif bahwa perlu memperhatikan tuntutan zaman. Minat dan profesi setiap orang dapat berubah, seorang pengusaha dapat menjadi pendeta, begitu juga sebaliknya. Ia menegaskan bahwa jika seorang pendeta ingin terjun ke dalam politik praktis harus menghadapi tantangan bahwa pertarungan politik sering kali mengabaikan nilai-nilai moral di dalamnya, pendeta harus bersikap bersih melawan kenyataan yang ada.³⁴

Sementara itu Ngelow berpendapat bahwa sebaiknya hamba Tuhan yang terjun ke dalam politik praktis meninggalkan jabatan kependetaannya, sebab ketika mereka mengikuti politik praktis maka mereka akan berada di bawah naungan partai politik yang mengatur kebijakan praktis maupun prinsip-prinsip ideologisnya, yang bisa jadi tidak sesuai dengan pandangan Alkitab, tidak bisa seseorang menghamba kepada dua tuan. Selain itu, alasan lainnya adalah agar pendeta yang menjadi anggota dari suatu politik tidak bertarung

³³ Borrong, *Etika Politik Kristen: Serba-Serbi Politik Praktis*, 26.

³⁴ Borrong, *Etika Politik Kristen: Serba-Serbi Politik Praktis*, 27.

dengan jemaat yang juga merupakan anggota dari partai politik lain yang dapat menimbulkan suatu perpecahan.³⁵

Peneliti melihat bahwa tantangan sangat besar bagi seorang hamba Tuhan memutuskan untuk terlibat dengan politik praktis. Mereka diperhadapkan pada kenyataan sulitnya melakukan pertarungan politik yang pada umumnya mengabaikan nilai-nilai moral, perpecahan di antara jemaat jika memihak ke salah satu partai politik, dan juga harus bersedia untuk tunduk kepada partai politik di mana mereka bergabung yang nilai dan ideologinya bisa jadi bertentangan dengan Alkitab. Bukan tidak mungkin bagi seorang hamba Tuhan untuk terlibat dalam politik praktis jika mampu bertarung menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Tetapi peneliti melihat bahwa peran seorang hamba Tuhan sebagai pemimpin dan pengajar lebih dibutuhkan di dalam jemaat untuk membimbing jemaat menentukan pilihan-pilihan yang tepat alih-alih sebagai partisipan langsung di dalam politik praktis. Ini juga sejalan dengan panggilan seseorang hamba Tuhan yang pada umumnya identik dengan melayani jemaat.

Refleksi Teologi: Dilema Moral Hamba Tuhan dalam Politik Praktis

Refleksi teologis menunjukkan bahwa ketika seorang hamba Tuhan memasuki ranah politik praktis, muncul setidaknya tiga dimensi dilema moral yang nyata dan saling terkait yakni pelayanan *versus* kekuasaan, integritas *versus* pragmatisme, dan kesetiaan pelayanan *versus* loyalitas politik.

Dimensi Pelayanan Versus Kekuasaan

Panggilan pelayanan kristiani sebagaimana yang diungkapkan dalam Khotbah di Bukit (Mat. 5:13-16) dan narasi Yesus tentang hamba yang melayani (Mrk. 10:42-45) menekankan kerendahan hati, pengorbanan, dan pelayanan bagi orang lain. Dalam praktik politik, arena kekuasaan seringkali menuntut dominasi, strategi, dan kompetisi. Hal demikian bertentangan dengan paradigma pelayanan Kristen yang menuntut kerendahan hati, pengorbanan, dan orientasi kepada sesama sehingga seorang hamba Tuhan yang terjun ke politik menghadapi risiko bahwa panggilan melayani berubah menjadi ambisi memenangkan jabatan atau kekuasaan. Jika seorang pendeta atau pemimpin gereja mencalonkan diri, bergabung partai, atau mengejar jabatan publik, maka dilema moral ini muncul yaitu apakah motivasi utamanya adalah pelayanan, atau kekuasaan?

Misalnya, studi King dan Fulton, yang menunjukkan bahwa pemimpin agama mempertimbangkan secara teologis dan pragmatis apakah mereka akan membawa wacana politik ke dalam ajaran mereka, apakah politik itu bagian dari panggilan pelayanan mereka atau tindakan yang bisa mencemari kesaksian mereka.³⁶ Dari hasil ini tampak bahwa

³⁵ Ngelow et al., *Teologi Politik: Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pascaorde Baru*, 26.

³⁶ Andrew L. Williams et al., "Politics and Preaching: How Religious Elites Justify Addressing or Avoiding Political Topics," *Politics and Religion* 17, no. 4 (2024): 627, <https://doi.org/10.1017/S1755048324000270>.

pemimpin rohani menimbang secara sangat matang apakah politik termasuk panggilan pelayanan atau harus dijauhkan agar tidak mencemari kesaksian mereka.

Singkatnya, hamba Tuhan yang terjun ke politik harus memastikan bahwa pelayanan tetap orientasi utama, bukan kekuasaan. Tujuan publik (kesejahteraan, keadilan) tetap melekat, bukan hanya kemenangan jabatan, dan karakter pelayanan tidak dikompromikan. Tanpa hal-hal ini, keterlibatan politik bisa merusak kredibilitas pelayanan gereja dan melemahkan kesaksian.

Dimensi Integritas Versus Pragmatisme

Ketika seorang hamba Tuhan memilih memasuki ranah politik praktis, salah satu tantangan etis utama adalah bagaimana mempertahankan integritas pelayanan berdasarkan nilai alkitabiah sambil menghadapi tekanan duniawi yang sangat nyata, yaitu logika kekuasaan, afiliasi partai, tekanan donor, dan pengaruh massa yang malapetaka jika tidak dikelola dengan bijaksana. Hamba Tuhan yang terlibat politik harus menghadapi godaan kompromi dengan logika duniawi, afiliasi partai, tekanan donor, pengaruh massa yang bisa menggoyah nilai alkitabiah mereka. Dalam konteks Indonesia, Lumoindong menemukan bahwa gereja menghadapi kurangnya pendidikan politik internal, sehingga banyak jemaat Kristen yang berpartisipasi politik secara minimal.³⁷ Kondisi ini mengindikasikan bahwa tanpa pembekalan politik yang etis dan terarah, hamba Tuhan dalam arena politik dapat tergoda menjadi pragmatis, mengutamakan kemenangan atau posisi daripada pelayanan moral.

Penelitian oleh Pangkey memperkuat bahwa terdapat dualisme konseptual di kalangan jemaat antara spiritualitas Kristen dan tanggung jawab kewargaan. Banyak jemaat mengakui pentingnya keadilan dan moral publik namun tetap menarik diri dari politik praktis karena khawatir “tercemar” oleh logika kekuasaan duniawi.³⁸ Karena itu, tanpa pendidikan politik yang etis dan terarah, hamba Tuhan yang aktif di arena politik bisa tergoda memilih pendekatan pragmatis, menjadikan jabatan atau keuntungan politik sebagai tujuan utama daripada pelayanan kepada sesama.

Keterlibatan hamba Tuhan dalam politik praktis harus dimulai dari refleksi panggilan yang mendalam untuk memastikan bahwa motivasi politik berakar pada semangat pelayanan, bukan ambisi kekuasaan (Mrk. 10:42–45). Gereja perlu membekali jemaat dan pelayannya dengan pendidikan politik berlandaskan nilai kristiani agar mereka memahami mekanisme politik tanpa kehilangan identitas rohani.³⁹ Selain itu, mekanisme akuntabilitas internal perlu ditegakkan melalui transparansi afiliasi politik dan pemisahan fungsi gerejawi dari jabatan publik agar gereja tidak kehilangan fungsi profetisnya. Hamba

³⁷ Lumoindong and Lumoindong, “Church Participation in Building Political Civilization in Indonesia,” 2914.

³⁸ Pangkey, “Pemahaman Dualisme Dan Perspektif Tentang Kekuasaan,” 143.

³⁹ Borrang, *Etika Politik Kristen: Serba-Serbi Politik Praktis*, 45.

Tuhan juga harus mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan, kerendahan hati, kejujuran, dan keadilan sebagai dasar setiap tindakan politik.⁴⁰

Dimensi Kesetiaan Pelayanan Versus Loyalitas Politik

Hamba Tuhan yang memilih menduduki partai politik atau jabatan pemerintahan membentangkan risiko dualitas identitas: sebagai pendeta/pelayan jemaat dan sebagai politisi. Jika jemaat melihat pemimpin mereka lebih sebagai politisi daripada pelayan, maka kredibilitas pelayanan bisa menurun dan bisa muncul konflik internal gereja. Temuan studi Williams dkk mendukung hal ini, yaitu alasan yang sama dapat menyebabkan pendeta yang berbeda mengambil pendekatan yang berbeda terhadap konten politik dalam khotbah.⁴¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika pelayanan rohani dicampur dengan afiliasi politik, muncul risiko bahwa fokus hamba Tuhan bergeser dari panggilan pelayanan menjadi loyalitas politik, loyalitas kepada partai, jaringan kekuasaan, dan logika politik.

Terjunnya hamba Tuhan dalam politik praktis bukan hanya soal keputusan praktis, tetapi juga mengaitkan soal identitas pelayanan. Ketika jemaat mulai melihat bahwa pemimpin mereka lebih condong pada politik daripada pelayanan rohani, maka kredibilitas pelayanannya bisa tergerus dan konflik internal gereja bisa muncul. Ketika pendidikan politik internal di gereja lemah, maka hamba Tuhan yang memasuki politik praktis berisiko beralih dari pelayan Kristus menjadi pelaku pragmatis dan partisan, sehingga gereja perlu menetapkan mekanisme akuntabilitas, transparansi afiliasi politik, dan pembekalan etis agar politik yang dijalani tetap sebagai sarana pelayanan yang berakar pada panggilan Kristus. Kedewasaan dan kejelasan akan panggilan seorang hamba Tuhan, menjadi dasar kesetiannya dalam pelayanan. Hal itu dibuktikan dari penelitian Ahnaf dan Lussier yang menyatakan bahwa para pemimpin agama, termasuk hamba Tuhan, punya peluang untuk memberi pengaruh dalam politik praktis. Namun para tokoh agama yang memiliki loyalitas terhadap pelayanan, lebih memilih untuk mempertahankan kesetiaan pada pelayanan, kepentingan jemaat, dan budaya harmoni lokal.⁴²

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan refleksi etis-teologis, dapat disimpulkan bahwa hamba Tuhan dapat terlibat dalam politik praktis di Indonesia sepanjang keterlibatan tersebut dilandaskan pada panggilan pelayanan dan tanggung jawab moral untuk menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan publik. Politik dalam perspektif etika Kristen bukanlah arena yang harus dihindari, melainkan salah satu wadah untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan perdamaian yang berakar pada kasih Kristus (Mat. 5:13–16; Mikha 6:8). Namun demikian, batas keterlibatan tersebut harus dijaga secara

⁴⁰ Glen H. Stassen and David P. Gushee, *Etika Kerajaan Allah* (Momentum, 2013), 112.

⁴¹ Williams et al., "Politics and Preaching," 629.

⁴² M. Iqbal Ahnaf and Danielle N. Lussier, "Religious Leaders and Elections in the Polarizing Context of Indonesia," *Humaniora* 31, no. 3 (2019): 227, <https://doi.org/10.22146/jh.49420>.

ketat, hamba Tuhan tidak boleh menukar identitas pelayanannya dengan ambisi kekuasaan, melainkan tetap menempatkan diri sebagai *servant leader* yang menyalurkan nilai-nilai etis alkitabiah dalam setiap tindakan politik. Dengan demikian, keterlibatan politik hamba Tuhan bukan tujuan akhir, tetapi sarana pelayanan publik yang etis dan profetis di tengah sistem demokrasi Indonesia.

Gereja sebagai lembaga rohani memiliki tanggung jawab penting untuk menyediakan pendidikan politik etis bagi jemaat dan pelayannya, membangun mekanisme akuntabilitas moral, serta menjaga netralitas kelembagaan agar kesaksian iman tidak tercemar oleh kepentingan politik praktis. Sementara itu, respon masyarakat Kristen dan umum terhadap keterlibatan hamba Tuhan dalam politik sangat bergantung pada sejauh mana integritas, konsistensi moral, dan transparansi pelayanan ditunjukkan. Penelitian ini, dengan demikian memberikan kontribusi bagi pengembangan etika politik Kristen kontekstual di Indonesia, yakni dengan menegaskan bahwa keterlibatan politik hamba Tuhan dapat dibenarkan secara teologis hanya bila dilakukan sebagai perpanjangan dari pelayanan Kristus bagi dunia, sebagai “garam dan terang” yang mempengaruhi kebijakan publik tanpa kehilangan kesucian panggilan rohaninya.

REFERENSI

- Ahnaf, M. Iqbal, and Danielle N. Lussier. “Religious Leaders and Elections in the Polarizing Context of Indonesia.” *Humaniora* 31, no. 3 (2019): 227–37. <https://doi.org/10.22146/jh.49420>.
- Arifianto, Yonatan Alex, and Aji Suseno. “Filsafat Politik Dan Praktisnya Dalam Perspektif Iman Kristen.” *Antusias: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 6, no. 2 (2020): 76–91.
- Borrong, Robert P. *Etika Politik Kristen: Serba-Serbi Politik Praktis*. Unit Publikasi dan Informasi & Pusat Studi Etika Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, 2006.
- Brotosudarmo, R. M. Drie S. *Etika Kristen Untuk Perguruan Tinggi: Etika Dasar Dan Penerapannya Dalam Hidup Praktis Manusia*. ANDI, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Demokrasi Di Indonesia: Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Darmaputera, Eka. *Etika Sederhana Untuk Semua*. BPK Gunung Mulia, 2004.
- Fletcher, Verne H. *Lihatlah Sang Manusia: Suatu Pendekatan Pada Etika Kristen Dasar*. BPK Gunung Mulia, 2007.
- Furidha, Brylialfi Wahyu. “Comprehension of The Descriptive Qualitative Research Method: A Critical Assessment of The Literature.” *Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 4 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443>.
- Lumoindong, Gilbert, and Greivance Lumoindong. “Church Participation in Building Political Civilization in Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5, no. 11 (2024): 2911–17. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i11.1499>.
- Ngelow, Zakaria J., Julianus Mojau, and John Campbell-Nelson. *Teologi Politik: Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pascaorde Baru*. Yayasan OASE INTIM, 2013.

- Pangkey, Agustina Sjelfrita. "Pemahaman Dualisme Dan Perspektif Tentang Kekuasaan: Terhadap Sikap Sosial Politik Orang Kristen." *TRANSFORMATIO: Jurnal Teologi, Pendidikan, dan Misi Integral* 2, no. 2 (2025): 133–48.
- Parel, T. J., and T. J. Maidiantius. *Politik Yesus Bagi Indonesia*. PT.Manata Bina Utama, 2014.
- Puasa, Anselmus, Meidy A. R. Noya, and Ricardo Freedom Nanuru. "Peran Politis Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH) Pada Pemilu 2024." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 7, no. 1 (2025): 361–69. <https://doi.org/10.37364/jireh.v7i1.439>.
- Rantung, Djoys Anake. "Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia." *Jurnal Shanan* 1, no. 2 (2017): 2. <https://doi.org/10.33541/shanan.v1i2.1492>.
- Ririhena, Lolita Luciana. *Buku Ajar Etika Kristen*. Penerbit Adab, 2022.
- Rodee, Clymer Carlton. *Pengantar Ilmu Politik*. PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sirait, Saut. *Politik Kristen Di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*. BPK Gunung Mulia, 2006.
- Sosipater, Karel. *Etika Pelayanan*. Suara, 2010.
- Stassen, Glen H., and David P. Gushee. *Etika Kerajaan Allah*. Momentum, 2013.
- Stassen, Glen H., and David P. Gushee. *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus Dalam Konteks Masa Kini*. Momentum, 2008.
- Susanta, Yohanes Krismantyo. "Orang Kristen Dan Politik: Belajar Dari Kasus Salomo Dan Adonia Dalam Persaingan Menuju Tahta." *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2019): 22–36.
- Tampenawas, Alfons Renaldo. "Pandangan Eklesiologi Calvin Mengenai Politik Praktis Dalam Pelayanan Gereja." *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.55884/thron.v1i2.7>.
- Williams, Andrew L., David P. King, and Brad R. Fulton. "Politics and Preaching: How Religious Elites Justify Addressing or Avoiding Political Topics." *Politics and Religion* 17, no. 4 (2024): 627–47. <https://doi.org/10.1017/S1755048324000270>.
- Yewangoe, Andreas. *Agama Dan Kerukunan*. BPK Gunung Mulia, 2001.